

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Ahmad Andriadi, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Makassar, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2012.
- Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*.(Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Efendy Marwan , *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Irwansyah Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artike,l* Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, cet.5, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1982.
- Nuryanto A Daim, *Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Justisia, Surabaya, 2014.
- O.Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- RM. Surachman and Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan Dan Kedudukannya* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.

Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, *rajawali Press*, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sukanto Satoto et. al, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Damara Press , Jakarta Selatan, 2024.

Willy D.s Voll, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal

Andy Sasongko, ‘Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan Kajian Filsafat Hukum)’, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10.2 (2022), 105 <<https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943>>.

Berry, Michael Frans, ‘Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan’, *Muhammadiyah Law Review*, 2 Februari (2018).

Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022), 268 <<https://doi.org/10.31078/jk1922>>.

I Wahyu Donri Tinambunan, Galih Raka Siwi , “Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2022), 125–42.

J Simanjuntak, *Kajian Yiridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara* . *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018.

Ni'matul Huda, R. Nazriyah, *Teori & peraturan perundang-undangan*, Cetakan II :Desember 2019.

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Nur Z. Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat al-Anwar J Kaji Islam dan Masy.* 2023;6(2):247. doi:10.24853/ma.6.2.247-272.

Ook Mufrohim and Ratna Herawati, “*Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia*,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 382.

Ridwan, Thalib H, Baharuddin H. *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi.* *J Lex Theory.* 2020;1(2):1396-1409.

Rusdianto, “*Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia*”, 6.Juni (2015), 99–108 <www.jchunmer.wordpress.com>.

Yusuf, Muhammad, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra, “*Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*,” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 21.02 (2019), 12–27 <https://doi.org/10.24123/yustika.v21i02.1500>

D. Internet

<https://radio-online.id/rri-pro1-jambi>, “Kewenangan Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Jambi”, Pro 1 RRI Jambi.
<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> .
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>.

E. Karya Ilmiah

Iska Tirta Adiyaksa, *Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.

Ivan Zikrillah, *kekuatan mengikat putusan mahkamah konstitusi dalam perspektif negara hukum Indonesia*, Tesis, Magister Hukum, Universitas Jambi, 2022.

Sjamsul Rakan, *Kedudukan Pengacara Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Studi Terhadap Sinkronisasi Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Advokat Sebagai Pengacara Negara)*, Tesis, Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2008.